

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sejak ditetapkannya Undang Undang MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Setiap Bupati dan Walikota memiliki kewenangan penuh untuk mengelola daerah kekuasaannya. Tujuan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Salah satu manfaat dari diberlakukannya Otonomi Daerah adalah terciptanya *Good Governance*. Untuk mencapai *Good Governance* itu sendiri, salah satu prinsip yang harus dipenuhi ialah akuntabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut seperangkat peraturan perundang – undangan telah digulirkan. Salah satunya adalah Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan praktek *Good Governance* khususnya akuntabilitas untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pertanggungjawaban dari kinerja instansi pemerintah dapat terlihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,

transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dimana kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik.

Pemerintah dalam menyusun suatu rencana strategi juga harus memperhatikan dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Banyak sekali kasus penyelewengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tidak sesuai dengan hukum bahkan ada juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini tentu sangatlah memprihatinkan dan menyedihkan. Jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak membuat dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka bagaimana masyarakat bisa menilai keberhasilan kinerja dari pemerintah. Masyarakat perlu tahu tentang rencana kedepan yang akan dilakukan pemerintah, maka dari itu semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan membuat dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang sesuai dengan peraturan perundangan.. Peringkat Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang yang di dapatkan oleh penulis , maka dapat lihat di tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Peringkat Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang
Tahun 2014, 2015 dan 2018

Tingkatan secara Nasional	2014		2015		2018	
	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor
Provinsi	9	2,6802	15	2,6885	17	2,8200
Kota	57	2,9114	56	2,6894	45	3,0768

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri

Berdasarkan tabel 1.1 yang di dapatkan diatas maka dapat ditarik penjelasan bahwa kinerja instansi pemerintah bila dilihat dari tingkatan provinsi, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 menduduki posisi 9 dengan skor 2,6802, pada Tahun 2015 dan 2018 kinerja instansi pemerintah di tingkat provinsi mengalami penurunan yaitu pada Tahun 2015 menduduki peringkat 15 dengan skor 2,6885 dan pada Tahun 2018 menduduki peringkat 17 dengan skor 2,820. Sedangkan pada tingkatan kota, terkhusus Kota Palembang justru mengalami kenaikan yaitu Pada Tahun 2014 menduduki peringkat 57 dengan skor 2,9114, Tahun 2015 menduduki peringkat 56 dengan skor 2, 6894 dan Pada Tahun 2018 menduduki peringkat 45 dengan skor 3,0768. Dikarenakan keterbatasan data maka penulis hanya mendapatkan data tahun 2014, 2015 dan 2018. Meskipun peringkat kinerja yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Palembang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang Tahun 2016-2017 masih mendapatkan predikat “ B” dengan score 63,55%.

Berdasarkan hasil evaluasi analisis capaian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang (LAKIP) tahun 2017, Pengukuran Kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun sebelumnya (2016) dan tahun mendatang (2017). Hasil evaluasi analisis capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang (LAKIP) tahun 2017 capaian kinerja Pemerintah Kota Palembang sudah cukup baik dimana realisasinya telah melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa target capaian akuntabilitas kinerja belum mencapai target yang ditetapkan dari tahun 2016-2017 dapat diilustrasikan dalam tabel 1.2 berikut dibawah ini :

Tabel 1.2
Capaian Kinerja tahun 2016-2017

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi 2016 (%)	Tahun 2017		
				Target	Realisasi	Capaian (2017)
1	Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah	1. Rasio realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap potensi pendapatan asli daerah	103,11	100%	99,31%	99,31%
		2. Rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap realisasi pendapatan	129,48	29%	32,10%	110,69%
Rata-Rata Capaian Kinerja						105%

Sumber :LAKIP Pemkot Palembang tahun 2016-2017

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja rasio realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD) belum mencapai target 100%, karena dari target potensi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.1.099.308.967.841,03 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang terealisasi Rp.1.091.745.710.476,86 atau tercapai sebesar 99,31%, sehingga dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang pada Tahun 2017 belum mencapai target sebesar 100%, terdapat kekurangan sebesar Rp.7.604.361.986,13 atau sebesar 0,69% dari target. Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang.

Salah satu agenda reformasi yang tertuang pada UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah adanya pergeseran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan kinerja yang disusun untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional yaitu tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran berbasis kinerja sangat menekankan konsep *value for money* yaitu ekonomis,

efisien dan efektif. Dengan basis kerja ini, penganggaran berorientasi pada output peningkatan pelayanan publik. Salah satu instrumen untuk memperkuat pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yaitu dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana telah dijelaskan pada PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diamankan bahwa setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan dimaksudkan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sebagai upaya meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

Selain itu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya (Thomson, et,al, 1991). Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi yang efektif dapat meningkatkan kinerja. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau website. Sistem informasi yang didukung TI dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif, Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi dari karyawan suatu organisasi. Bodnar dan Hopwood (2000) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Penggunaan perangkat

keras dan perangkat lunak tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan informasi secara cepat dan akurat.

Penelitian ini mengacu pada Dwi lestari (2018) yang mengungkapkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Publik BLUD Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis menambahkan unsur Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai salah satu aspek untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Penelitian Dwi Lestari dilakukan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sebagai obyek penelitian sedangkan pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan wajib pemerintah. Beberapa penelitian terdahulu juga mendukung pernyataan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Nurlaili (2016) menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Kabupaten Jember. Penelitian yang dilakukan oleh Bandi (2006) dalam Sutrisno (2010) menunjukkan Bahwa Investasi Teknologi Informasi Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan tersebut. Indriasari dan Ertambang (2007) dalam Sutrisno (2010) juga menyimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh Terhadap Nilai Informasi Pelaporan. Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik mengambil judul skripsi, yaitu : **"Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Standar Pelayanan Minimal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang"**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu:

1. Apakah Anggaran Berbasis Kinerja Berkontribusi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang ?

2. Apakah Standar Pelayanan Minimal Berkontribusi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang ?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berkontribusi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis membatasi masalah hanya pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada di kota Palembang, berdasarkan variabel Anggaran Berbasis Kinerja, Standar Pelayanan Minimal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sedangkan objek penelitiannya dilakukan di 6 OPD kota Palembang Sumatera Selatan yaitu pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan maret sampai dengan bulan juni 2019.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kontribusi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kontribusi standar pelayanan minimal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Palembang.
3. Untuk mengetahui kontribusi pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian

ini, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai kontribusi anggaran berbasis kinerja, standar pelayanan minimal, dan pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pemerintah agar dapat meningkatkan pertanggungjawaban kinerjanya dan sebagai informasi bagi para masyarakat maupun para Stakeholder untuk mengetahui akuntabilitas kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah yang telah dilakukan. Dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas mutu kinerja OPD di kota Palembang.

3. Bagi Lembaga Politeknik Negeri Sriwijaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur yang bermanfaat dan menambah wawasan khususnya di Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik serta menjadi referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.

